



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU,
PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019- 2024.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 17 Tahun 2023
TANGGAL : 5 Mei 2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Badan Statistik Pusat
		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk >25 Tahun	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$	Badan Statistik Pusat
			Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	Badan Statistik Pusat
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Badan Statistik Pusat
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}}$	Badan Statistik Pusat

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Kementerian Agama
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Kementerian Agama
2.1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur		Rata-rata Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar	Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar (%) (peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun, Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang melalui Terminal/ Dermaga/Bandara Pertahun	$\frac{\text{Pergerakan orang/barang}_{(n)} - \text{Pergerakan orang/barang}_{(n-1)}}{\text{Pergerakan orang/barang}_{(n-1)}} \times 100$	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah tangga yang memiliki air minum layak}}{\text{Jumlah Rumah tangga se Provinsi Riau}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak}}{\text{Jumlah Rumah tangga se Provinsi Riau}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik bagi Rumah Tangga	Rasio Elektrifikasi	$\frac{\text{Jumlah KK pelanggan PLN dan non PLN}}{\text{Jumlah KK}} \times 100$	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi dengan Baik	$\frac{\text{Luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik}}{\text{Luas lahan pertanian}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.2	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Provinsi = $(0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$ Dimana : IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat provinsi IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Dimana: L_{ij} = Konsentrasi baku peruntukan air (j) C_i = Konsentrasi sampel parameter kualitas (i) IP_j = Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j = $(C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots)$ (C_i/L_{ij}) Maksimum = Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij}) Rata-rata = C_{ij}/L_{ij} Nilai rata-rata dari	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Indeks Kualitas Air Laut	$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Dimana Q_i = Sub indeks untuk parameter kualitas air ke i W_i = Bobot parameter kualitas air ke i	-

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				n = Jumlah parameter kualitas air	
			Indeks Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}\right) \times (I_{eu} - 0,1)$ $IEU = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kabupaten/kota Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kabupaten/kota	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Indeks Lahan	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ Dimana : DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				di Kesatuan Ekosistem Gambut LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah kabupaten/kota atau provinsi	
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Emisi Gas Rumah Kaca	Emisi Gas Rumah Kaca (satuan berat CO2 ekuvalen) = $\frac{\text{Data Aktivitas}}{\text{Faktor Emisi}}$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1	Mewujudkan Perkonomian yang Mandiri dan Berdaya Saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB HK (DM/TM) tahun t) - (PDRB HK (DM/TM) tahun t - 1) (PDRB HK(DM/TM) tahun t - 1)	Badan Statistik Pusat
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan	Nilai PDRB ADHB	PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun (tahun berjalan). Harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan kontribusi/struktur ekonomi 1. Pendekatan Produksi $PDRB = \sum_{i=1}^n Q_{it}$ Keterangan: t = tahun ke - t Q = output (produksi) i = 1, ... n sektor	Badan Statistik Pusat

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				2. Pendekatan Pengeluaran $PDRB = C + I + G + (X - M)$ Keterangan: C = konsumsi, pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa → menengah dan akhir I = investasi, pengeluaran untuk peralatan modal, inventaris, dan struktur → bukan obligasi dan saham G = pengeluaran pemerintah, pengeluaran untuk barang dan jasa oleh lokal, negara bagian, dan federal $X - M$ = ekspor bersih, ekspor dikurangi impor	
			Koefisien Gini	dimana: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: ☐ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah ☐ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang ☐ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	Badan Statistik Pusat
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sisi konsumsi dalam 1 (satu) tahun	Badan Statistik Pusat

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4.1	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu		Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimajukan 11 Objek Pemajuan Kebudayaan}}{\text{Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimajukan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya keberlanjutan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	$\frac{\text{Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi}}{\text{Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya Pengembangan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan
4.2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Meningkatnya Pemanfaatan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan
			Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dalam satu tahun	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Data diperoleh dari Pintu Masuk dan MPD	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kenyamanan Wisatawan	Rata-rata Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan dalam satu tahun	Dinas Pariwisata

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Mancanegara			
5.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tataaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Sekretariat Daerah - Biro Organisasi - Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey penilaian dari masyarakat berupa kuisioner dengan pedoman berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	- Sekretariat Daerah - Biro Organisasi - Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau terkait Pelayanan
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Opini BPK Nilai SAKIP	Laporan prediklat hasil audit keuangan dari BPK RI Perwakilan Riau Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 4 komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	- BPK RI Perwakilan Riau - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Inspektorat - Sekretariat Daerah - Biro Organisasi
			Nilai LPPD	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Kemendagri yang memuat hasil penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci	- Kementerian Dalam Negeri - Sekretariat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				(IKK) Pemerintah Provinsi Riau	- Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	$Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ dimana: • Indeks Domaini adalah nilai indeks domain ke-i; • BD_i adalah nilai bobot domain ke-i; • NA_{ij} adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i; • BA_{ij} adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-l.	- Sekretariat Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 17 Tahun 2023
TANGGAL : 5 Mei 2023

No	Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
Dinas Pendidikan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Akses Pendidikan
		Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B
3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang mengajukan perizinan terlayani
Dinas Kesehatan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau
		Jumlah Penduduk yang menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui <i>Budget Sharing</i>
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes dan Makan Minuman yang memenuhi Standar
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Kawasan yang terlindungi Daya Rusak Air
		Luas Daerah Irigasi Fungsional
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Produksi SPAM Regional
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Daya Tampung TPA
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan SPALD
6	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau yang dibangun/ditingkatkan Infrastruktur
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Strategis yang dibangun dan dipelihara

No	Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Strategis yang ditata
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang Bersertifikasi
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang
12	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pemenuhan RLH Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah
13	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang Sudah Ditangani
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Kawasan Permukiman yang Ditangani
15	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi
16	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan Lintas Kabupaten/Kota yang Termediasi
Satuan Polisi Pamong Praja		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanggulangan Bencana
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah di Provinsi Riau
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Dinas Sosial		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS yang di tingkatkan Kapasitasnya Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Pulih dan Berkembang Keberfungsian Sosialnya Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
6	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Kondisi Taman Makam Pahlawan yang terpelihara
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan

No (1)	Perangkat Daerah/Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)
	Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan
5	Program Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan
7	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang direncanakan
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang dikembangkan
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang diberdayakan
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Provinsi Riau
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif
8	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun (Grand Design Pembangunan Kependudukan) GDPK 5 Pilar
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Wilayah Rawan Pangan
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura

No (1)	Perangkat Daerah/Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)
8	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang ditingkatkan Kompetensinya
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Air
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lahan
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Limbah B3 yang dikelola
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Peningkatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Peningkatan Masyarakat/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan LH
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari LH/ Pameran LH
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kualitas Udara
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kehutanan
13	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Penambahan Luas Tutupan Hutan
14	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan
15	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat di Bidang Kehutanan
16	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase IKM Kabupaten/Kota Sangat Baik terkait Pendaftaran Penduduk
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase IKM Kabupaten/Kota Sangat Baik terkait Catatan Sipil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Pengguna Database Kependudukan
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang disusun
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa dan Desa Adat yang difasilitasi

No	Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
8	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kawasan Pedesaan Kewenangan Provinsi yang terbangun
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang
10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Aktif Persentase BUMDES Maju
Dinas Perhubungan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perhubungan
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Pelayaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Ketersediaan Data Sektor
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat, Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan Rata-rata hasil Penilaian Koperasi
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) yang diberdayakan
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Tertib Usaha
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
11	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor
12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terakreditasi
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama UMKM
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian, Perdagangan dan UKM
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri (RIPIN)
16	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha

No (1)	Perangkat Daerah/Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)
		Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
17	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Informasi Industri Secara Berkala
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event yang dilaksanakan
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin Prinsip yang diterbitkan
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang dibina
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet Potensial yang dibina
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang dibina menjadi Kader Pramuka
	Dinas Kebudayaan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan
4	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah yang dibina
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi
6	Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang memperoleh Akreditasi
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang sudah melaksanakan Pengelolaan Arsip yang bernilai Baik
	Dinas Kelautan dan Perikanan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelanggaran yang ditangani
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan
	Dinas Pariwisata	
1	Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan

No	Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
	Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Perkantoran Bidang Pariwisata
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan yang dikembangkan
3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Produk Pariwisata yang Berhasil dipasarkan
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kematian Ternak Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi
Dinas Perkebunan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin
6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pengelolaan Kegeologian
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pelaku Usaha yang dibina
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Bauran Energi
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Desa Berlistrik
Sekretariat Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah
2	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Nilai RB Baik
3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Pelayanan Dasar yang dikendalikan Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Non Pelayanan Dasar yang

No (1)	Perangkat Daerah/Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)
		dikendalikan
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Bina Mental Spiritual yang dikendalikan
5	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Dikendalikan
		Persentase BLUD yang Berkinerja Baik
		Persentase BUMD yang Berkinerja Baik
		Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Potensi SDA yang dikendalikan
7	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dikendalikan
Sekretariat DPRD		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Badan Pendapatan Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pendapatan Daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah
		Persentase Tingkat Pelayanan Publik Pengelolaan Pendapatan yang terpenuhi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola
Badan Kepegawaian Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepegawaian
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan dan Pelatihan
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan

No	Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
	Badan Penghubung	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Penghubung
2	Program Pelayanan Penghubung	Presentase Layanan Terhadap <i>Stakeholder</i>
	Inspektorat	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Hasil Evaluasi Persentase OPD yang difasilitasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS yang berfungsi sesuai Regulasi
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Dinas Pendidikan	APK SM Sederajat	$APKSM = \frac{a3}{b3} \times 100\%$ Ket: a3 : Jumlah Murid SM/Sederajat b3 : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun
		APM SM Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Murid SM Sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$
		Angka Putus Sekolah SM Sederajat	$APTS = \frac{\text{Jumlah peserta didik putus sekolah jenjang SMA/SMK}}{\text{Jumlah seluruh peserta didik jenjang SMA/SMK}} \times 100 \%$
		Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan pendidikan Menengah dan Khusus terakreditasi}}{\text{Seluruh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus}} \times 100\%$
2	Dinas Kesehatan	Persentase Penurunan Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu pada tahun sebelumnya – Jumlah kematian ibu tahun berjalan}}{\text{Jumlah kematian ibu tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Persentase Penurunan Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi pada tahun sebelumnya – Jumlah kematian bayi tahun berjalan}}{\text{Jumlah kematian bayi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Persentase Penurunan Kematian Balita	$\frac{\text{Jumlah Kematian Balita pada tahun sebelumnya – Jumlah kematian Balita tahun berjalan}}{\text{Jumlah kematian Balita tahun sebelumnya}} \times 100\%$

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
		Prevalensi Stunting	$\frac{\text{Jumlah Balita pendek dan sangat pendek berdasarkan indikator (tinggi badan dibagi umur)}}{\text{Jumlah Balita yang diukur tinggi badannya}} \times 100\%$
		Persentase Orang Dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART)	$\frac{\text{Jumlah ODHA (Orang dengan HIV AIDS) yang menjalani terapi ARV}}{\text{Jumlah ODHA hasil estimasi}} \times 100\%$
		Success Rate TB	$\frac{\text{Jumlah Pasien baru TB BTA Positif (sembuh pengobatan lengkap)}}{\text{Jumlah Pasien baru TB BTA Positif yang diobati}} \times 100\%$
		Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk	$\text{Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk} \times 100\%$
		Persentase Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 sd 59 tahun yang dilakukan screening/ deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 sd 59 tahun}} \times 100\%$
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$
		Persentase Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i>	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk berdampak Krisis Kesehatan akibat dan/atau berpotensi Bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana dalam satu tahun}} \times 100\%$
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang terakreditasi}}{\text{Jumlah semua RS dan Puskesmas}} \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan (RS Arifn Achmad)	$\frac{\text{Jumlah nilai per unsur Kuesioner yang terisi}}{\text{Jumlah nilai per unsur Kuesioner yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang per unsur (0,111)}$
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan (RS Jiwa)	$\frac{\text{Jumlah nilai per unsur Kuesioner yang terisi}}{\text{Jumlah nilai per unsur Kuesioner yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang per unsur (0,111)}$

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan (RS Petala Bumi)	$\frac{\text{Jumlah nilai per unsur Kuesioner yang terisi}}{\text{Nilai tertinggi per unsur (0,111)}}$
		Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	$\frac{\text{Jumlah SPM layanan yang tercapai}}{\text{Total layanan SPM}} \times 100\%$
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	$\frac{\sum \text{Bangunan dan kawasan yang diselenggarakan per tahun}}{\sum \text{Bangunan dan kawasan yang diselenggarakan sd tahun 2024}} \times 100\%$
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Rata-rata persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\sum \text{Luas lahan pertanian fungsional}}{\sum \text{Luas Lahan baku pertanian}} \times 100\%$
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	$\frac{\sum \text{Panjang ruas jalan dalam kondisi mantap}}{\sum \text{Total panjang ruas jalan Provinsi}} \times 100\%$
		Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	$\frac{\sum \text{SR tersambung}}{\sum \text{Total target SR pada wilayah layanan}} \times 100\%$
		Persentase perencanaan SPALD Regional	Persentase penyediaan dokumen perencanaan SPALD Regional
		Persentase luas lahan TPA yang terbangun	Persentase luas lahan TPA yang terbangun
		Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi	$\frac{\sum \text{Jumlah tenaga ahli yang telah disertifikasi}}{\sum \text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi Provinsi Riau}} \times 100\%$
		Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	$\frac{\sum \text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai denga tahun penanganan}}{\sum \text{Luas permukiman kumuh kewenangan provinsi}} \times 100\%$
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	$\frac{\sum \text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
		Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi	$\sum \text{Nilai Aspek turbinlak Nilai Aspek turbinlak Kabupaten/kota}$

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
		Riau	
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pelayanan ketentraman dan keteriban umum yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah pemeliharaan ketentraman dan keteriban umum yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pemeliharaan ketentraman dan keteriban umum yang harus dilaksanakan}} \times 100\%$
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan prioritas ketahanan daerah pada tahun } n}{\text{Prioritas Ketahanan Daerah}} \times 100\%$
6	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial dan berhasil berfungsi secara sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial pada tahun } n}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan pada tahun } n} \times 100\%$
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS pada tahun } n}{\text{Jumlah PSKS keseluruhan pada tahun } n} \times 100\%$
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme Wajib Laport Ketenagakerjaan pada Tahun } (n)} \times 100\%$
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Kelembagaan PUG yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh Kelembagaan PUG di Provinsi Riau}} \times 100\%$
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Ket: Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kondisi perlindungan terhadap anak yang dihitung berdasarkan 5 klaster yaitu : 1. Hak sipil dan kebebasan 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 5. Perlindungan khusus
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPPO	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	$\frac{\text{Jumlah Pasangan usia subur (PUS) yg sedang menggunakan KB modern}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \times 100$

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
		(mCPR)	
9	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Skor PPH Ketersediaan	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman ketersediaan kelompok pangan (% AKE x bobot masing-masing kelompok pangan)
		Persentase wilayah rentan pangan	Jumlah Kecamatan yang rentan pangan dibagi jumlah kecamatan di Provinsi Riau dikali 100
		Persentase peningkatan keamanan pangan segar	Selisih persentase keamanan segar tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya dibagi persentase keamanan segar tahun sebelumnya dikali 100
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Durian)	Jumlah tanaman yang menghasilkan pada tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Angka Tetap dari BPS Provinsi Riau)
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Cabe)	Jumlah luas panen cabe tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Angka Tetap dari BPS Provinsi Riau)
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Jagung)	Jumlah luas panen jagung tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Angka olahan Dinas PTPH Provinsi Riau)
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi)	Jumlah luas panen padi tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Angka tetap dari BPS Provinsi Riau)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Indeks Kualitas Air	Dimana : $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ = Konsentrasi baku peruntukan air (j) C_i = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (j) IP_j = Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j = $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)$ (C_i/L_{ij}) Maksimum = Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij}) Rata-rata = Nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij} $IKAL = \sum_{i=1}^n QiWi$ Dimana : Q_i = Sub indeks untuk parameter kualitas air ke i
		Indeks Kualitas Air laut	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
		Indeks Kualitas Udara	$W_i = \text{Bobot parameter kualitas air ke } i$ $n = \text{Jumlah parameter kualitas air}$ $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}\right) \times (I_{eu} - 0,1)$ $IEU = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kabupaten/kota Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kabupaten/kota
	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah		$\frac{\text{Besaran Emisi GRK tahun } i - \text{Besaran Emisi GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK tahun sebelumnya}} \times 100$ i = Tahun yang ingin diketahui
	Indeks Kualitas Lahan		$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ Dimana : DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah kabupaten/kota atau provinsi

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN $\frac{\text{Besaran Emisi GRK tahun } i - \text{Besaran Emisi GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK tahun sebelumnya}} \times 100$ i = Tahun yang ingin diketahui Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus) $\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Desa Cepat berkembang}}{\text{Jumlah Desa se Provinsi Riau}} \times 100\%$
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	
		Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Akuntabel	
12	Dinas Perhubungan	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Rata-rata persentase pemenuhan layanan Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan Pelayaran
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	SKM = Total dari Nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi *Nilai penimbang
		Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Hasil Penjumlahan dari : Jumlah dari nilai tingkat kematangan dibagi Jumlah Indikator
		Persentase Pemanfaatan Data Sektoral	$\frac{\text{Jumlah permintaan data sektoral tahun N}}{\text{Jumlah ketersediaan data sektoral tahun N}} \times 100\%$
			*Data terkumpul bertambah 100 per tahun
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi Aktif bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif bersertifikat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$
		Persentase Meningkatnya Nilai Ekspor dan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat	
		Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan	Ket: Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi $Y = C + G + I \text{ (X-M)}$

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
			$G = \text{Pengeluaran Pemerintah}$ $X = \text{Ekspor}$ $M = \text{Impor}$
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelayanan Publik yang berbasis Inovasi (RPJMD)	$\frac{\text{Total dari Nilai dari persepsi per unsur x nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ Indeks Kepuasan Masyarakat (dari OPD)
		Realisasi Investasi	Jumlah Proyek Investasi PMA/PMDN yang terealisasi
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional	Atlet dihitung dari Single Event dan Multi Event ditingkat wilayah dan nasional yang diikuti (POPNAS, POSPENAS, PRA POPNAS, PEPARPENAS, PON, Kejurnas antar PPLP)
		Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang aktif berorganisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan}}{\text{Jumlah Pemuda yang ada}} \times 100\%$
		Partisipasi Pemuda dalam ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang berwirausaha}}{\text{Jumlah Pemuda yang ada}} \times 100\%$
17	Dinas Kebudayaan	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi	$\frac{\text{Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi}}{\text{Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$
		Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$
		Persentase Budaya Melayu Riau yang Dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase Perpustakaan yang Sesuai SNP	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan yang memiliki standart nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi (SMA, SMK, Khusus, OPD dan perpustakaan Soeman HS}} \times 100\%$
		Persentase Masyarakat menggunakan Akses Layanan Kearsipan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan masyarakat menggunakan layanan kearsipan data penduduk usia 15 sd 69 tahun}}{\text{X}} \times 100\%$

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Σ Hasil Produksi perikanan Tangkap + Perikanan Budidaya + Perikanan Pengolahan
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan	$X = \frac{Ci}{Si} \times 100$ Dengan Penjelasan Sebagai berikut : Ci : Jumlah Pelaku Usaha yang patuh Si : Jumlah Sampel pelaku usaha yang diperiksa N : Jumlah Komponen Pelaku Usaha
		Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	PSDKP = Jumlah SDK yang dimanfaatkan (Ha) x 100%
			Data diperoleh dari Pintu Masuk dan MPD
20	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Data diperoleh dari Pintu Masuk dan MPD
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Data diperoleh dari kunjungan Destinasi di tiap Kabupaten/Kota
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan dalam satu tahun
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Produksi Daging	Jumlah Pemotongan ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam ras pedaging dan ayam buras dikali berat karkas)
		Persentase Status Kesehatan Hewan	$\frac{\text{Populasi Hewan} - \text{Jumlah Hewan Sakit}}{\text{Populasi Hewan}} \times 100\%$
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	$\frac{\text{Jumlah Produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner)}}{\text{Jumlah Produk pangan asal hewan yang beredar}} \times 100\%$
22	Dinas Perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan	Jumlah produksi = Luas Tanaman menghasilkan (TM) x Produktivitas (Kg/Ha) / 1000
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik (KK)	Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
24	Sekretariat Daerah	Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah)	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Energi PDRB}}{\text{Jumlah Izin usaha pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan} \times 100\%}$
		Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha pertambangan keseluruhan}}{\text{Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah} \times 100\%}$
		Persentase pemakaian air tanah yang melakukan upaya konservasi	$\frac{\text{Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah}}{\text{Jumlah pengguna air tanah yang berizin}} \times 100\%$
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang bina mental spiritual yang dikendalikan	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan yang dirumuskan}} \times 100\%$
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar yang dikendalikan	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan yang dirumuskan}} \times 100\%$
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang non pelayanan dasar yang dikendalikan	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan yang dirumuskan}} \times 100\%$
		Persentase BLUD yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah BLUD berkinerja baik}}{\text{Jumlah Seluruh BLUD}} \times 100\%$
		Persentase BUMD yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah BUMD berkinerja baik}}{\text{Jumlah Seluruh BUMD}} \times 100\%$
		Persentase rumusan kebijakan di bidang pemanfaatan potensi SDA yang dikendalikan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan yang dirumuskan}} \times 100\%$
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Perencanaan yang dikendalikan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Perencanaan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan Perencanaan yang dirumuskan}} \times 100\%$
		Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 4 komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
		Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus disusun}} \times 100\%$	
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	$\frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum daerah yang sesuai peraturan perundang – undangan}}{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang ada}} \times 100\%$	
		Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum di Provinsi Riau	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah hukum}}{\text{Jumlah masalah hukum yang ada}} \times 100\%$	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	
		Indeks Pemerintah Daerah	Nilai	
		Persentase rumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang dikendalikan	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang di laksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan yang dirumuskan}} \times 100\%$	
25	Sekretariat Perwakilan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas Lembaga DPRD	$\frac{\text{Jumlah realisasi layanan pelaksanaan tugas lembaga DPRD}}{\text{Jumlah target layanan pelaksanaan tugas lembaga DPRD}} \times 100\%$	
		Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	$\frac{\text{Jumlah realisasi layanan pelaksanaan fungsi legislasi lembaga DPRD}}{\text{Jumlah target layanan pelaksanaan fungsi legislasi lembaga DPRD}} \times 100\%$	
		Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	$\frac{\text{Jumlah realisasi layanan pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPRD}}{\text{Jumlah target layanan pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPRD}} \times 100\%$	
		Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	$\frac{\text{Jumlah realisasi layanan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPRD}}{\text{Jumlah target layanan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPRD}} \times 100\%$	
		Indeks Perencanaan	$30\% \text{ sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah} + 30\% \text{ sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah} + 40\% \text{ integrasi perencanaan pembangunan daerah}$	
26	Badan Perencanaan Daerah, dan Penelitian	Persentase Program yang Mencapai	$\frac{\text{Jumlah Program Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja Tinggi dan Sangat Tinggi}}{\text{Total Jumlah Program Pembangunan daerah dikalikan}} \times 100\%$	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
	Pengembangan	Target Kinerja Persentase Arah Kebijakan RPJMD yang Didukung Hasil Kelibangan	$\frac{\text{Jumlah hasil kelibangan tahun } n - 1 \text{ yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah hasil kelibangan tahun } n - 1} \times 100\%$
27	Badan Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas Pendapatan Transfer Rasio Efektivitas Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Dana Transfer}}{\text{Target Penerimaan Dana Transfer}} \times 100\%$ $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah}}{\text{Target Penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah}} \times 100\%$ $\text{Hasil survey kepuasan Masyarakat}$
28	Badan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau (beda dengan yang disampaikan) Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau Rata-rata waktu pemrosesan surat perintah membayar (SPM) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Waktu Penyampaian RAPBD – Penyampaian Rancangan KUA PPAS ke DPRD Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan Paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya SPM Kriteria yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau: 1. Kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan sistem pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 4. Kecukupan pengungkapan pada catatan atas Laporan keuangan
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	$\frac{\text{Jumlah Aset Tanah, gedung dan bangunan yang telah diinventarisasi}}{\text{Jumlah Aset Tanah, gedung dan bangunan}} \times 100\%$
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang menyampaikan Ranperda APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD}} \times 100\%$
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$

FORMULASI PERHITUNGAN																				
No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama																		
29	Badan Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	Indeks Komposit atas 8 Aspek Sistem Merit dengan bobot tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tatacara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah																	
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Form Pengukuran IP ASN Dimensi Kompetensi (Lampiran III Perka BKN Nomor 8 tahun 2019)																	
		Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Nilai Pengukuran Terhadap Kualitas Tenaga Pengajar, Penyelenggara dan Sarana Pelatihan (Permenpan tentang pelayanan Publik)																	
31	Badan Penghubung	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$																	
32	Inspektorat Daerah	Jumlah OPD yang mendapat Predikat WBK/WBBM	$\frac{\text{Jumlah OPD yang diterima usulannya oleh MenpanRB Untuk Penilaian WBK/WBBM}}{\text{Jumlah OPD yang ditetapkan}} \times 100\%$																	
		Indeks Maturitas SPIP	Tingkat Level Maturitas SPIP yang hendak di capai setelah di <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP																	
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat Level Kapabilitas APIP Inspektorat yang hendak di capai yang di <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP																	
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Toleransi Umat Beragama	<table><tr><th>KATEGORI/KRITERIA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA</th><th>INDEKS KOMPOSIT</th><th>POIN</th><th>VARIABEL</th></tr><tr><td rowspan="5">KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG RUKUN</td><td rowspan="5">Toleransi</td><td>10</td><td>➢ hidup bertetangga dengan penganut agama lain</td></tr><tr><td>10</td><td>➢ penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/keurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat</td></tr><tr><td>10</td><td>➢ penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/keurahan tempat tinggal Anda</td></tr><tr><td>10</td><td>➢ anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain</td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr></table>		KATEGORI/KRITERIA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	INDEKS KOMPOSIT	POIN	VARIABEL	KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG RUKUN	Toleransi	10	➢ hidup bertetangga dengan penganut agama lain	10	➢ penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/keurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat	10	➢ penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/keurahan tempat tinggal Anda	10	➢ anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain	10	
KATEGORI/KRITERIA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	INDEKS KOMPOSIT	POIN	VARIABEL																	
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG RUKUN	Toleransi	10	➢ hidup bertetangga dengan penganut agama lain																	
		10	➢ penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/keurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat																	
		10	➢ penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/keurahan tempat tinggal Anda																	
		10	➢ anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain																	
		10																		
		Indeks Kerjasama Umat Beragama																		

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN																					
			<table><tr><td>Kerjasama</td><td>10</td><td>➢ berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>➢ terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>➢ berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>➢ jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>➢ berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama lain)</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>➢ membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah</td></tr></table>				Kerjasama	10	➢ berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain		10	➢ terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama		10	➢ berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain		10	➢ jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama		10	➢ berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama lain)		10	➢ membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah
Kerjasama	10	➢ berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain																						
	10	➢ terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama																						
	10	➢ berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain																						
	10	➢ jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama																						
	10	➢ berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama lain)																						
	10	➢ membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah																						
		<table><tr><td>Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</td><td>$\frac{\sum \text{Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun (n)}}{\sum \text{Jumlah Konflik Sosial tahun (n)}} \times 100$</td></tr><tr><td>Indeks Kebebasan</td><td> IDI Provinsi Riau = $\sum_{i=1}^3 i P_i I(A_i)$ IDI : Indek Demokrasi Indonesia Pi : Nilai Penimbang dari Aspek ke i I(Ai) : Indeks Aspek ke i I : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesetaraan $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ I(Ai) : Indeks Aspek ke i Pij : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i I(Aij) : Indeks Variabel ke j dari aspek ke i AHP : <i>Analytical Hierarchy Procedur</i> </td></tr><tr><td>Indeks Kapasitas Lembaga</td><td>IDI Provinsi Riau = $\sum_{i=1}^3 i P_i I(A_i)$</td></tr><tr><td>Indeks Demokrasi Indonesia</td><td>IDI</td></tr></table>	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\sum \text{Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun (n)}}{\sum \text{Jumlah Konflik Sosial tahun (n)}} \times 100$	Indeks Kebebasan	IDI Provinsi Riau = $\sum_{i=1}^3 i P_i I(A_i)$ IDI : Indek Demokrasi Indonesia Pi : Nilai Penimbang dari Aspek ke i I(Ai) : Indeks Aspek ke i I : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesetaraan $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ I(Ai) : Indeks Aspek ke i Pij : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i I(Aij) : Indeks Variabel ke j dari aspek ke i AHP : <i>Analytical Hierarchy Procedur</i>	Indeks Kapasitas Lembaga	IDI Provinsi Riau = $\sum_{i=1}^3 i P_i I(A_i)$	Indeks Demokrasi Indonesia	IDI														
Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\sum \text{Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun (n)}}{\sum \text{Jumlah Konflik Sosial tahun (n)}} \times 100$																							
Indeks Kebebasan	IDI Provinsi Riau = $\sum_{i=1}^3 i P_i I(A_i)$ IDI : Indek Demokrasi Indonesia Pi : Nilai Penimbang dari Aspek ke i I(Ai) : Indeks Aspek ke i I : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesetaraan $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ I(Ai) : Indeks Aspek ke i Pij : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i I(Aij) : Indeks Variabel ke j dari aspek ke i AHP : <i>Analytical Hierarchy Procedur</i>																							
Indeks Kapasitas Lembaga	IDI Provinsi Riau = $\sum_{i=1}^3 i P_i I(A_i)$																							
Indeks Demokrasi Indonesia	IDI																							

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI PERHITUNGAN
		Demokrasi	P_i : Nilai Penimbang dari Aspek ke i $I(A_i)$: Indeks Aspek ke i I : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesenjangan $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ $I(A_i)$: Indeks Aspek ke i P_{ij} : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i $I(A_{ij})$: Indeks Variabel ke j dari aspek ke i AHP : <i>Analytical Hierarchy Procedure</i>
		Persentase Masyarakat yang Paham terhadap nilai – nilai Wawasan Kebangsaan	$\frac{\sum \text{Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan nilai – nilai wawasan kebangsaan}}{\sum \text{Jumlah kelompok masyarakat}} \times 100$

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR